

# PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI *PRIME MOVER* KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG

Rofi Wahanisa, Arif Hidayat, Nurul Fibrianti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Email: rofiwahanisa@yahoo.com

**Abstrak.** Penguatan kapasitas aparat pemerintah desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1) berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kebebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.

**Kata Kunci :** Renstra, Pemetaan, Desa, Komoditas Unggulan

## PENDAHULUAN

Desa sebagai suatu sistem masyarakat dapat mengembangkan strategi untuk membangun komitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengatasi ancaman eksternal melalui peluang yang ada. Proses analisis, perumusan, penetapan komitmen dan evaluasi langkah-langkah yang diambil disebut perencanaan strategis terpadu. Tujuan utama perencanaan strategis terpadu adalah agar organisasi dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan yang sedang dan akan terjadi.

Jetis merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Posisinya berada di dataran tinggi yaitu 700 m di atas permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 2000 mm per-tahun. Bandungan telah dikenal oleh banyak orang sebagai kawasan wisata alam dan pesona cagar budaya berupa Candi Gedongsongo dan Candi Bubrah. Bandungan juga terkenal akan hasil pertanian sayuran dan buah sebagai pemasok utama bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Desa Jetis adalah salah satu penghasil paling dominan, oleh karena itu STA Pasar Sayur terbesar di Jawa Tengah berada di Desa Jetis. Selain itu Jetis juga merupakan penyuplai bunga potong dan bunga hias yang cukup besar (Gema Suara Jetis, Edisi 1 Maret 2009).

Batas utara Desa Jetis adalah desa Duren, Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pasekan, sisi timur berbatasan dengan desa Mlilir dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Bandungan. Desa Jetis terdiri dari 7 Dusun yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur, diantaranya adalah dusun Ngunut, Ngasem, Deso, Ngawinan, Krajan, Jetis dan Jombor. Jumlah Penduduk Jetis kurang lebih berjumlah 1000 KK dengan jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kepedulian terhadap

pendidikan tergolong cukup tinggi, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan warga yang lulus perguruan tinggi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jetis sebagai daerah yang subur, kehidupannya sangat kental dengan bidang pertanian. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, baik buah, sayur maupun bunga. Tanaman-tanaman tersebut tumbuh subur dan begitu menarik seperti permadani hijau yang menyegarkan mata dan menambah keindahan desa Jetis. Potensi industri kecil juga berkembang cukup pesat di desa Jetis, baik kerajinan jahit, bordir maupun brongsong klengkeng dan pembuatan tempe.

Potensi yang demikian beragam mulai dari suburnya wilayah, strategisnya posisi desa yang dilalui jalan wisata ke bandungan dan kenyataan menjamurnya hotel di desa tersebut berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan perkapita penduduknya. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan desa sangatlah penting, mengingat masyarakat secara langsung ataupun tidak merupakan aktor utama dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Selama ini yang terjadi adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan desa, oleh karena itu untuk mencapai efektifitas pengelolaan desa diperlukan peran masyarakat secara langsung melalui keterpaduan rencana pengelolaan berdasarkan rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model

perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional).

Atas dasar uraian di atas, pengembangan wilayah merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di pedesaan yang sangat rentan dan berat menghadapi perubahan yang berskala global. Perubahan paradigma perlu dilakukan dalam menata kembali daerah-daerah yang dikategorikan miskin dan lemah agar mampu meningkatkan daya saing, manajemen produksi dan teknologi tepat guna berbasis lokal yang mampu mempengaruhi daerah lainnya secara timbal balik. Secara sederhana konsep pengembangan wilayah perlu dilakukan dalam perencanaan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat masyarakat di lapisan bawah agar dapat mempengaruhi pasar secara berkelanjutan.

## METODE

Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, simulasi, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan *stakeholders* di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan pemetaan desa sebagai *Prime Mover* komoditi unggulan menuju desa produktif. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1). Berbagi pengalaman proses pendokumentasian pemetaan dan perencanaan Desa; (2). Diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif dokumen pemetaan kawasan desa; dan (3). Menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam pemetaan kawasan pedesaan sebagai *Prime Mover* untuk menentukan prioritas komoditi unggulan

masing-masing dusun menuju desa produktif.

**Tabel 1. Metode yang digunakan dalam pengabdian**

Metode	Kegiatan yang dilakukan
Brainstorming.	Identifikasi permasalahan dan harapan (Tim Pengabdian)
Pelatihan	Prioritas dan Strategi Pembangunan Kawasan dalam bentuk Desa terpilih sebagai Pusat Pertumbuhan (Rofi Wahanisa) Bentuk-bentuk Kebijakan yang paling tepat dan optimal untuk menjadikan desa terpilih sebagai <i>Prime Mover</i> (Nurul Fibrianti)
Simulasi kelompok sasaran	Simulasi pemetaan kawasan pedesaan oleh aparatus dan <i>stakeholders</i> di desa Jetis (Fasilitator: Arif Hidayat)
Pendampingan/ Fasilitasi	Tersusunnya dokumen Pemetaan Kawasan Desa sebagai <i>Prime Mover</i> Komoditi Unggulan masing-masing dusun (Tim Pengabdian)
Evaluasi	Angket (Tim Pengabdian)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penguatan Kesadaran Hukum *Stakeholders* Ekonomi Pedesaan Dalam Pengelolaan Komoditas Unggulan Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan

*Assesment* dalam pelatihan ini dilakukan dengan yang membagi peserta dalam 2 kelompok sehingga mendapatkan gambaran realitas kebutuhan desa, sebagai berikut:

- a) Asesment Kelompok 1 – BPD :
  - 1) Mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing RT atau RW.
  - 2) Rembuk Desa.
  - 3) Sosialisasi melalui kelompok tahlil.
  - 4) Tokoh masyarakat sebagai fasilitator.
  - 5) Hasil dari tokoh masyarakat dapat

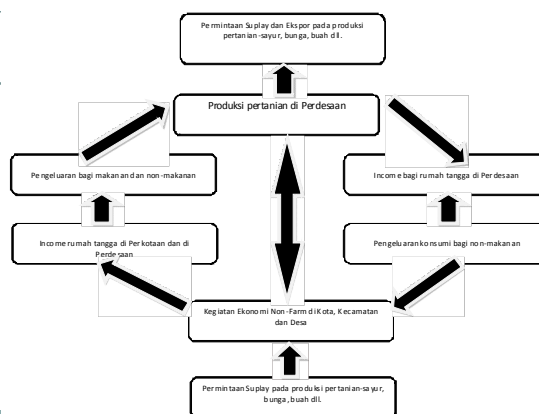
- dioptimalkan di tingkat desa.
- 6) Desa dan BPD membahas draft rencana strategis desa.
- b) Asesment Kelompok 2 – Perangkat Desa :
- 1) Diharapkan yang memulai adalah BPD
  - 2) BPD berharap ada dukungan pihak-pihak yang ada
  - 3) Perlu adanya penyadaran fungsi dan tujuan BPD
  - 4) Yang penting komitmen bukan omong doing
  - 5) Peserta latihan sebagai agen/tokoh penyadaran dan panitia pembentuk tim
  - 6) Yang dicari adalah solusi, bukan pengadilan provokatif.

Pelatihan dokumentasi rencana strategis desa yang dilakukan di Desa Jetis ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi seluruh instansi di Bandung, juga sebagai sumber data penelitian sekaligus pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa. Kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam penyusunan renstra diperlukan untuk dapat mengambil kebijakan di tingkat kabupaten maupun propinsi serta mampu menarik minat investor untuk ikut serta terlibat dalam roda pembangunan di Kecamatan Bandung.



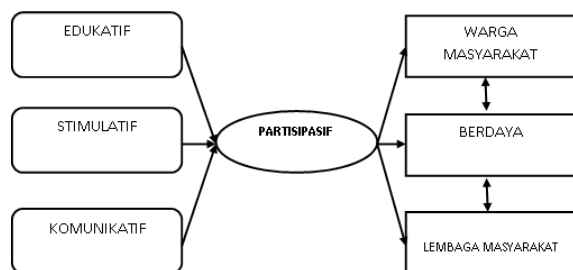
**Gambar 1. Foto Proses dan Hasil Asesment Anggota BPD dan Perangkat Desa**

Hasil perumusan peserta pelatihan mengenai bagan alir perencanaan strategis di bidang pertanian Desa Jetis, dapat ditampilkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Bagan Alir Perencanaan Strategis Bidang Pertanian. Sumber: Dokumen Hasil Pleno Peserta Pelatihan di desa Jetis, Selasa, 13 September 2011**

Hasil rumusan lain berupa Profil Desa Jetis (Lampiran 6). Pola pembangunan partisipatif yang dikembangkan adalah, sebagai berikut:



**Gambar 3. Bagan Konsep  
Pembangunan Partisipatif**

## 2. Pola Perencanaan Strategis Desa Berbasis Kewilayahan untuk Penentuan Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Desa Secara *Sustainable*.

Desa sebagai suatu sistem masyarakat dapat mengembangkan strategi untuk membangun komitmen dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengatasi ancaman eksternal melalui peluang yang ada. Proses analisis, perumusan, penetapan komitmen dan evaluasi langkah-langkah yang diambil disebut perencanaan strategis terpadu. Tujuan utama perencanaan strategis terpadu adalah agar organisasi dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan yang sedang dan akan terjadi.

Desa beserta komponen di dalamnya dari masa ke masa akan berubah akibat pengaruh dari kekuatan internal dan eksternal. Pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan *stakeholders* lain akan selalu berusaha untuk mencari kesesuaian antara kedua kekuatan itu menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi keberlangsungan warga masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui suatu proses pengamatan dan penelaahan yang berhati-hati mencakup; sumber daya, aturan, siklus manajemen, personil, harapan, tujuan, masyarakat dan komitmen. Di samping itu, dilakukan identifikasi dan pengujian

terhadap faktor-faktor lain yang menjadi peluang atau penghambat.



**Gambar 4. Foto Penyerapan Aspirasi dan Identifikasi Potensi Desa**

Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antar daerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga pedesaan.

Konsep demokrasi, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembukaan ruang bagi partisipasi publik

dalam penyelenggaraan negara adalah inti dasar dari negara demokrasi. Upaya penguatan peran & fungsi: kelembagaan, kebijakan, potensi, dan sumber daya lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan.

Sejak lahirnya Renstra sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional namun juga di aras lokal desa. Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah, di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kebebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan

membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun Renstra partisipatif di Desa Jetis.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Realisasi kegiatan penguatan kapasitas aparat desa dalam penyusunan Renstrades berbasis kewilayahan ini dinilai cukup berhasil, mengingat partisipasi aktif, keseriusan dan antusiasme peserta. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses pendokumentasian rencana strategis Desa Jetis adalah :
  - a) Modal utama dalam pembuatan Renstra desa Jetis yaitu adanya komitmen dari aparat desa.
  - b) Aparat desa merupakan poros terpenting dalam pembuatan Renstra.
  - c) Pembangunan desa harus mempunyai tujuan.
  - d) Pembuatan Renstra dikerjakan secara bersama oleh seluruh komponen di masyarakat.
  - e) Renstra sebagai landasan desa untuk realisasi pembangunan di masa yang akan datang.
  - f) Renstra sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan desa

- g) Renstra sebagai konsep acuan pembangunan desa yang sesuai dengan kultur masyarakat setempat.
2. Hambatan yang dihadapi selama kegiatan pengabdian ini berlangsung bukanlah merupakan hambatan yang mendasar, mengingat materi dan perangkat untuk pelatihan sudah dipersiapkan dengan baik. Di antara kendala yang ada adalah sebagai berikut:
- a) Keberlanjutan program sehingga diskusi dan simulasi dirasa masih kurang
  - b) Keterbatasan biaya dan media yang diperlukan dalam kegiatan pelatihan

### Saran

Berdasarkan tanggapan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelatihan, pembelajaran yang dapat diambil dari pelatihan ini adalah :

1. Para peserta merasa bahwa pendokumentasian rencana strategis adalah tugas aparat desa.
2. Perlu adanya tekanan kebutuhan akan dokumen Renstra dari kecamatan maupun dari kabupaten.
3. Fasilitator harus dapat memberikan gambaran, maksud dan tujuan dari rencana strategis desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir, 2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Modul Local Governance Program (LGP), "Legislatif Drafting", Lembaga Percik Salatiga.
- Piliang, Indra J. dkk (editor), 2003. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa
- Said, M. Mas'ud, 2005. *Arah Baru Otonomi*

*Daerah di Indonesia*, Malang: UMM Press

SH Sarundajang, 2003. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan

Slamet Luwihono, "Renstra (RENSTRA ): Instrumen Menggapai kesejahteraan Masyarakat di Era Transisi Otonomi Daerah", dalam Majalah Tetruka, Edisi Januari 2005

Suryabrata, Sumadi, 1994. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali

Yayasan Salimna, "Mengubah Perilaku Melalui Sebuah Peraturan", Suara Kampung, No. 6, Edisi Juli 2004